

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Tugas Pokok : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;  
 b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;  
 c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan  
 d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .

| No. | Tujuan/ Sasaran   | Indikator Kinerja Utama   | Baseline (2021) | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan  | Sumber Data                               |
|-----|---|---|-----------------|--|---|
| 1   | Meningkatnya kualitas LPPD                                | Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel | 100%            | (Jumlah IKK yang valid : Jumlah IKK Keseluruhan) x 100%  | Permendagri                               |
| 2   | Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi               | Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi                                     | 100%            | ( Jumlah Warga Negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang terlayani : Jumlah Warga Negara Yang Berhak Menerima pelayanan dasar yang harus dilayani) x 100% | Permendagri                               |
| 3   | Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah                 | Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah                  | 100%            | (Jumlah usulan yang difasilitasi : Jumlah usulan yang masuk) x 100%  | Biro Pem dan Otda (Bagian Kerjasama)      |
| 4   | Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat | Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilaksanakan    | Belum diukur    | (Jumlah indikator tugas GWPP yang dilaksanakan : Jumlah tugas GWPP sesuai Permendagri) x 100%  | Biro Pem dan Otda (Bagian Otonomi Daerah) |

|   |   |   |     |  |   |
|---|---|---|-----|--|---|
| 5 | Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah | 1. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya.                 | 75% | (Jumlah Segmen Batas Yang Diusulkan Permendagrinya : Jumlah Segmen batas Keseluruhan) x 100% | Biro Pem dan Otda (Bagian Pemerintahan) |
|   |   | 2. Persentase usulan Nagari/desa/ Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya | 85% | Jumlah Usulan Yang Difasilitasi : Jumlah Usulan Yang Masuk x 100%                            | Biro Pem dan Otda (Bagian Pemerintahan) |

Kepala Biro Pemerintahan  
Dan Otonomi Daerah



DONI RAHMAT SAMULO, S.STP, M.Si  
NIP.19760618 199511 1 001